KEMENTERIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA	NOMOR SOP	KH. 19. 02. 02. 05
	TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal  Nico Afinta
	NAMA SOP	SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 7, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Verifikator: Mampu melakukan verifikasi berkas-berkas permohonan dan memberikan persetujuan atas permohonan hingga penyedia berhasil terverifikasi. 2. Pelaku Usaha: Melakukan kegiatan registrasi di SPSE termasuk mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan registrasi sesuai persyaratan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
Tidak Ada	1. Komputer/scanner/printer; 2. Jaringan Internet; 3. Panduan Pengguna SPSE.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pemilihan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REGISTRASI DAN VERIFIKASI

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Verifikator	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengakses website SPSE Kementerian Hukum kemudian menekan tombol pendaftaran penyedia			Panduan Pengguna SPSE sebagai Pelaku Usaha	5 Menit	Halaman pendaftaran pelaku usaha	
2.	Mengisi alamat email pelaku usaha			Email pelaku usaha	5 Menit	Email berisi link konfirmasi	
3.	Membuka kotak masuk email yang didaftarkan dan menekan tombol konfirmasi melanjutkan pendaftaran			Email berisi link konfirmasi	5 Menit	Halaman formulir online pendaftaran pelaku usaha	
4.	Mengisi formulir online pada website SIKaP			Halaman formulir online pendaftaran pelaku usaha	20 Menit	Permohonan pendaftaran akun pelaku usaha diterima verifikator	
5.	Mengirimkan kelengkapan berkas untuk verifikasi akun pelaku usaha			1. KTP Pelaku Usaha; 2. NPWP Pelaku Usaha; 3. NIB Berbasis Risiko; 4. Akta Pendirian/Perubahan Badan Usaha serta Pengesahan dari Kementerian Hukum (jika berbentuk badan usaha).	30 Menit	Kelengkapan berkas verifikasi diterima	Pengiriman kelengkapan berkas verifikasi dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi kantor verifikator atau mengirimkan kelengkapan berkas melalui email.
6.	Melakukan verifikasi kesesuaian berkas pendaftaran dengan formulir isian: a. Jika tidak lengkap/tidak sesuai, dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki atau dilengkapi b. Jika sesuai, dilakukan persetujuan permohonan		(a) (b)	Kelengkapan berkas pelaku usaha	1 Jam	Hasil verifikasi dokumen pelaku usaha	
7.	Melakukan login menggunakan user id dan password yang telah dibuat dan mengisi kelengkapan identitas pelaku usaha pada website SIKaP			1. User ID dan Password; 2. Dokumen pelaku usaha.	20 Menit	Identitas pelaku usaha terisi lengkap	

Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/02/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25